



Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Stabilitas Moneter Di Indonesia

Roni Marice Br Sembiring

¹Universitas Sumatera Utara

email: roni.marice88.brahmana@gmail.com

Article Info :

Received:

12/11/25

Revised:

16/11/25

Accepted:

19/11/25YY

Abstract (10 PT)

The problem of this study is how the influence of Payment Card (APMK) on inflation and the Rupiah exchange rate. The purpose of this study is to investigate and analyze the effect of the transaction APMK against inflation and the effect of the transaction APMK to foreign Rupiah exchange from January 2011 until April 2014. The hypothesis of this study is the APMK transactions has a significant impact on inflation in Indonesia, and the transaction APMK has a positive effect on the rupiah exchange rate.

Secondary data was collected through website of Bank Indonesia and Indonesia BPS data. The analytical method which used was descriptive method by using linear regression using eviews program 5.1. to go in hypothesis result. The hypothetical result indicated that the increased of transaction of APMK from early 2011 until April 2014 significantly effected on inflation in Indonesia and positively effected on the exchange rate of rupiah.

Keywords : Card Payment (APMK), inflation, exchange rate of rupiah

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah (Kurs). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transaksi APMK terhadap inflasi dan pengaruh transaksi APMK terhadap nilai tukar rupiah (kurs) dari bulan Januari 2011 sampai bulan April 2014. Hipotesis dalam penelitian ini ialah transaksi APMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia, dan transaksi APMK memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai tukar rupiah (Kurs). Pengambilan data sekunder melalui website Bank Indonesia dan data BPS Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan menggunakan program eviews 5.1 untuk mengetahui hasil hipotesis.

Pada hasil hipotesis menunjukkan bahwa meningkatnya transaksi APMK dari awal tahun 2011 sampai bulan April 2014 berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia dan berpengaruh positif terhadap nilai tukar rupiah (kurs).

Kata Kunci : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Inflasi, nilai tukar



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini ikut mempengaruhi perkembangan alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan semakin tingginya tingkat ketergantungan antar pelaku ekonomi satu sama lain, sehingga menuntut sistem pembayaran semakin efektif, efisien dan aman untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini menyebabkan pelaku bisnis di bidang perbankan selalu memiliki inovasi baru dalam mengeluarkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal tersebut.

Menurut Bank Indonesia (2008), alat pembayaran berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai terdiri dari alat pembayaran berbasis kertas, alat pembayaran menggunakan kartu dan alat pembayaran transfer dana elektronik.

Salah satu indikator dalam pengukuran efisiensi dari sistem pembayaran dapat dilihat dengan bagaimana sistem tersebut meminimalkan biaya untuk memperoleh manfaat dari sebuah transaksi. Sebagaimana bunyi dari prinsip ekonomi, sama dengan sistem pembayaran bahwa pelaku ekonomi akan memilih menggunakan jasa pembayaran yang menarik biaya serendah mungkin (Muttaqin, 2006).

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain *phone banking*, *mobile banking*, ATM, kartu debit, kartu kredit, *smart card*.

Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronis tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumen pembayaran (tunai dan non tunai), bank, lembaga kliring dan setelmen, infrastruktur dan sistem hukum. Tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 yang menjelaskan tentang tiga pilar utama dalam upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.

Di sisi sistem pembayaran non tunai, sebagaimana *international common practice*, sistem pembayaran di Indonesia diklasifikasikan menjadi sistem pembayaran yang bersifat *Systemically Important Payment System* (SIPS), *System Wide Important Pay-ment System* (SWIPS) dan sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS.

SIPS adalah sistem yang memproses transaksi-transaksi pembayaran yang bernilai besar dan apabila terjadi kegagalan dalam sistem pembayaran ini dapat menyebabkan terjadinya *systemic risk* yang dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, contohnya adalah sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Sementara itu SWIPS adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat luas, yang apabila terganggu, misalnya karena seringnya terjadi *system breakdown* atau adanya *fraud* akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dan pada gilirannya dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat atas sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses melalui sistem tersebut. Di Indonesia yang termasuk dalam kategori SWIPS adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Sementara, sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS, contohnya adalah *money remittance*.

Teknologi pembayaran juga berdampak pada peningkatan transaksi ekonomi. Hal ini, terlihat antara lain pada peningkatan transaksi transfer dana melalui sistem kliring yang diselenggarakan Bank Indonesia yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan melalui sistem transfer dana nilai besar yang kita kenal dengan istilah sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), serta dalam kegiatan bayar membayar menggunakan sistem pemroses Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Bank Indonesia mencatat penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ATM atau debit, kartu kredit dan *e-money* menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2013, penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu ATM, ATM Debit dan kartu kredit mencapai Rp 4.020 triliun melalui 3,7 miliar transaksi dengan jumlah kartu hingga 104,6 juta unit. Sedangkan hingga Maret 2014 mencapai RP 1.075 triliun melalui 994,4 juta transaksi dengan jumlah peredaran kartu 107,8 juta unit.

Kebijakan moneter kontraktif diimplementasikan dengan jalan meningkatkan tingkat suku bunga. Dengan meningkatnya suku bunga, maka hasrat masyarakat untuk melakukan konsumsi akan menurun, sebab dalam keadaan ini, masyarakat lebih memilih menabung karena dirasa menguntungkan. Sementara bagi perbankan, akan mengalami pelemahan kemampuan memberikan pinjaman. Dampak-dampak tersebut akan menyebabkan peredaran uang melambat karena peredaran uang umumnya masuk ke dalam deposito. Dalam jangka waktu kurang dari satu tahun umumnya kondisi ini akan menjinakkan inflasi.

Cara lain untuk mengatasi inflasi yaitu melalui sistem pembayaran, Bank Indonesia berupaya menjaga kelancaran aktivitas perekonomian. Dalam perekonomian modern sekarang ini tidak ada satupun yang dapat terlepas dari uang dan alat pembayaran sejenisnya. Guna menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat meminimalkan peredaran uang dari masyarakat guna mengerem inflasi yang terjadi. Lebih dari itu Bank Indonesia juga menjamin keamanan dalam penggunaan alat pembayaran.

Menurut Rahutami (2004) dari hasil kajiannya mengenai mekanisme transmisi, ia menyimpulkan nilai tukar merupakan jalur mekanisme transmisi yang lebih kuat dan cepat dalam mempengaruhi output dan inflasi. Ini mempengaruhi stabilitas moneter di Indonesia.

Dari Fenomena terhadap keadaan diatas maka Penulis mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap lalu lintas pembayaran di Indonesia. Sehingga Penulis mengambil judul “**Pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap stabilitas moneter di Indonesia**”. Dalam penelitian mengenai pengaruh sistem pembayaran non tunai terhadap stabilitas moneter di Indonesia ini Penulis hanya membahas salah satu instrumen pembayaran non tunai yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari ATM atau debit dan kartu kredit.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2005). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pembayaran non tunai yang diwakili oleh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Variabel dependennya adalah inflasi dan nilai tukar Rupiah (nilai Kurs).

Penelitian ini dilakukan pada website Bank Indonesia. Jadwal Penelitian dimulai bulan Maret 2024 sampai dengan selesai. Definisi operasional merupakan sebuah penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini beserta satuan matematik atas setiap variabel tersebut. Dibawah ini merupakan tabel definisi operasional dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Parameter
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, Kartu <i>Automated Teller Machine</i> (ATM) Kartu Debet, Kartu Prabayar, dan atau yang disamakan dengan itu.	Jumlah/angka dalam jutaan rupiah
Inflasi	meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga yang dimaksud adalah apabila terjadi kenaikan harga barang- barang secara meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya	Angka Inflasi= Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam persentase
Nilai Tukar (Kurs)	tarif yang menunjukkan nilai tukar mata uang tertentu dengan mata uang lainnya	Rupiah terhadap mata uang tertentu

Pada penelitian ini yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Inflasi, Angka Inflasi yang digunakan didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK), serta dinyatakan dalam bentuk persentase laju inflasi dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Indonesia mulai dari bulan Januari tahun 2011 sampai dengan Maret 2014.
2. Nilai Tukar (kurs), tarif yang menunjukkan nilai tukar mata uang tertentu dengan mata uang lainnya dengan standar pengukuran rupiah (Rp). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (US\$).
3. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dalam penelitian in digunakan data total dari nilai transaksi menggunakan pembayaran APMK, total transaksi dari kartu debit dan ATM ditambah dengan total transaksi dari kartu kredit yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Data yang digunakan dari bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2014.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk dokumentasi yang disajikan dalam

format elektrik. Menurut Burhan Bungin (2005:122), bahwa sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekundr dari data yang kita butuhkan, misalnya data diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dalam berbagai masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Inflasi dan nilai kurs yang diperoleh dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengakses situs Bank Indonesia. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program computer software Eviews 5.1.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan model ekonometrik. Metode analisi data yang digunakan yaitu Fungsi Linear berganda dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan model kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Leats Square/OLS*). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), inflasi, nilai tukar rupiah (kurs) dinyatakan dalam fungsi :

$$Y = f(X_1, X_{t-1}) \dots\dots\dots (1)$$

Dari fungsi (1) dapat dispesifikasikan dengan menggunakan autoregresif :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

- Y = Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
- α = Intercept
- β_1 = Koefisien Regresi Inflasi
- β_2 = Koefisien Regresi Nilai Tukar (Kurs)
- X_1 = Inflasi
- X_2 = Nilai Tukar (Kurs)
- μ = Term of Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. Peningkatan kinerja tersebut disertai dengan perbaikan kualitas pertumbuhan yang tercermin dari tingginya peran investasi dan ekspor sebagai sumber pertumbuhan, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang semakin membaik. (Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011, Bank Indonesia)

Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus yang relatif besar dengan cadangan devisa yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi. Di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski sempat terjadi tekanan di pasar keuangan pada semester II tahun 2011 sebagai dampak memburuknya krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS). Dengan ketahanan ekonomi yang kuat dan risiko utang luar negeri yang rendah, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang tetap pruden dan berbagai langkah kebijakan struktural yang terus ditempuh selama ini, Indonesia kembali memperoleh peningkatan peringkat menjadi *Investment Grade*.

Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat mampu meminimalkan dampak dari gejolak ekonomi global. Ketidakpastian yang muncul akibat krisis utang Eropa dan kekhawatiran terhadap prospek pemulihan perekonomian AS telah memicu gejolak di pasar keuangan dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global tahun 2011. Dampak dari gejolak global tersebut ke Indonesia lebih banyak dirasakan di pasar keuangan terutama pasar saham dan obligasi, sementara dampak pada sektor riil relatif minimal.

Di sisi lain, penyesuaian nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya juga kembali mendorong ekspor industri pengolahan yang sebelumnya mengalami pelemahan. Dengan perkembangan ini, meskipun lebih lambat dari pertumbuhan 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan tahun 2013 tercatat 5,8%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi *peer countries*. Pada sisi lain, ekspor yang membaik dan impor yang menurun telah mendorong menurunnya defisit transaksi berjalan secara signifikan menjadi 2% dari PDB pada triwulan IV 2013, jauh lebih rendah dari defisit transaksi berjalan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

Transaksi modal finansial juga mengalami perbaikan yang bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri korporasi, penarikan simpanan bank domestik di luar negeri, dan arus masuk Penanaman Modal Asing Langsung yang tetap stabil. Secara keseluruhan tahun 2013, defisit transaksi berjalan 2013 meningkat dibandingkan dengan defisit tahun sebelumnya sehingga mencapai 3,3% dari PDB, tetapi tidak setinggi perkiraan semula. Cadangan devisa dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup aman yaitu 99,4 miliar dolar AS atau setara 5,5 bulan impor dan ULN pemerintah.

A. Gambaran Umum Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK) di Indonesia

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2004, yang berisi tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk memastikan penggunaan dimasyarakat berjalan dengan aman, efisien dan mudah dalam hal pembayaran tunai dan non tunai.

Di sisi sistem pembayaran non tunai, sebagaimana *international common practice* sistem pembayaran di Indonesia diklasifikasikan menjadi sistem pembayaran yang bersifat *Systemically Important Payment System* (SIPS), *System Wide Important Payment System* (SWIPS) dan sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS. SIPS adalah sistem yang memproses transaksi-transaksi pembayaran yang bernilai besar dan apabila terjadi kegagalan dalam sistem pembayaran ini dapat menyebabkan terjadinya *systemic risk* yang dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, contohnya adalah sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*.

Sementara itu SWIPS adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat luas, yang apabila terganggu, misalnya karena seringnya terjadi *system breakdown* atau adanya *fraud* akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dan pada gilirannya dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat atas sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses melalui sistem tersebut. Di Indonesia yang termasuk dalam kategori SWIPS adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Sementara, sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS contohnya adalah *money remittance*.

Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) merupakan bagian dari perkembangan sistem pembayaran non tunai. Yang termasuk dalam APMK adalah aktivitas penggunaan instrumen pembayaran menggunakan kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit. Transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen APMK pada saat ini bersifat *account based*, sehingga setelah transaksi dilakukan pada level bank dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank (penyelenggara) sesuai dengan skala operasional jaringannya.

Perkembangan jumlah pemegang APMK mengalami peningkatan dari waktu ke waktu baik disisi volume dan nilai transaksi. Perkembangan tersebut diprediksikan terus berlangsung sejalan dengan semakin beragamnya fasilitas/fungsi APMK. Dengan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran dan keinginan perbankan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, penggunaan fungsi APMK menjadi lebih beragam. Penggunaan kartu ATM tidak

hanya untuk penarikan tunai atau pengecekan saldo namun juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran (misalnya pembayaran tagihan listrik dan telpon, pembelian pulsa, belanja online dan lain-lain).

Menurut statistik Bank Indonesia, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan APMK mulai dari tahun 2011 sampai April 2014.

Tabel 1.2 Perkembangan APMK tahun 2011 sampai April 2014

Periode	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014			
				Januari	Februari	Maret	April
Kartu Kredit	14,785,382	14,817,168	15,091,684	15,124,109	15,150,829	15,100,335	15,209,803
Kartu ATM	3,623,992	4,533,187	6,292,164	6,314,019	6,443,526	6,512,880	6,591,572
Kartu ATM + Debet	59,761,318	73,219,365	83,170,125	83,765,345	85,192,517	80,505,714	81,314,701

Sumber : Bank Indonesia

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2011 sampai April 2014 semakin maraknya penggunaan APMK selain di dorong oleh banyaknya mesin ATM dan EDC (*Electrinoc Data*

Captured), didorong pula oleh banyaknya merchant APMK yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

B. Hasil dan Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Penggunaan Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) di Indonesia mulai dari tahun 2011 sampai dengan April 2014.

Analisis Koefisien Determinasi

Adapun hasil dari koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,81 maka hal ini menunjukkan bahwa R^2 mendekati 1 yang berarti bahwa adanya hubungan antara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dengan variabel APMK yang bersifat positif dan sempurna, artinya apabila ada kenaikan tingkat inflasi dan nilai kurs maka akan menyebabkan kenaikan penggunaan APMK.

Tabel 1.3 Hasil Analisa Regresi berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25426665	7653395	-3.322273	0.0020
X1	10575.38	1019.812	10.36993	0.0000
X2	-1562317.	667457.9	-2.340697	0.0247
R^2	0.814616			
Adj. R^2	0.804596			
F-statistic	81.29301			

Sumber : Data olahan, Eviews 5.1

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi hubungan antar variabel bebas yang dapat diketahui melalui nilai R^2 . Apabila R^2 dari masing-masing regresi dari variabel kemudian dibandingkan dengan nilai R^2 model utama (awal) dimana R^2 lebih tinggi dibandingkan dengan R^2 model utama, maka didalam regresi parsial tersebut terdapat multikolinieritas.

Hasil menunjukkan bahwa korelasi antar variabel cukup erat. Hal ini dapat dilihat dari nilainya 0,72 dan 0,88. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier yang hampir sempurna antara inflasi dan nilai kurs tersebut secara individual terhadap penggunaan APMK.

Tabel 1.4 Hasil Analisa Multikolinieritas

	X1	X2	Y
X1	1.000000	0.721292	0.887223
X2	0.721292	1.000000	0.525189
Y	0.887223	0.525189	1.000000

Sumber : Data Olahan Eviews 5.1

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi atau serial autokorelasi terjadi apabila term of error (μ) dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Didalam model autoregresif untuk menguji keberadaan autokorelasi digunakan h-statistik atau uji Lagrange Multiplier atau LM test.

Uji LM akan menghasilkan Statistic Breusch Godfrey, Pengujian Breusch Godfrey (BG Test) dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) menggunakan autoregressive model. Hasil pengujian LM test ini diperoleh sebagai berikut :

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :

F-statistic	33.77253	Probability	0.000000
Obs*R-squared	33.64587	Probability	0.000020

Sehingga untuk dapat memutuskan ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan perbandingan nilai X^2_{hitung} dengan nilai X^2_{tabel}

$$X^2_{hitung} (\text{Obs} \times R\text{-squared}) = 33.64587$$

$$X^2_{tabel} (\text{Chi-squared}) = 67.505$$

Berdasarkan data diatas didapat $X^2_{hitung} (33.64587) < X^2_{tabel} (67.505)$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan.

C. Pembahasan

Seiring dengan berkembangnya inovasi dari pihak perbankan di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat yang beralih dari pembayaran tunai kepada pembayaran non tunai. Karena selain aman dan mudah dibawa kemana-mana, tren juga merupakan salah satu faktor pendukungnya. Hal ini ternyata membawa pengaruh bukan hanya kepada jumlah transaksi perharinya dan percepatan proses perputaran uang, namun ternyata hal ini juga memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai tukar dan inflasi yang terjadi selama tahun 2011 sampai April 2014.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembayaran menggunakan kartu memiliki pengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Hal ini terbukti hasil uji statistik yang menunjukkan hasil R^2 yang mencapai 81%. Angka ini menunjukkan bahwa APMK memiliki pengaruh sebesar 81% terhadap kenaikan inflasi dan nilai tukar rupiah selama tahun 2011 sampai April 2014.

KESIMPULAN

Kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian memberikan manfaat peningkatan efisiensi dan produktifitas keuangan yang mendorong aktivitas sektor riil pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan *velocity of money*. Inovasi dalam alat pembayaran non tunai dapat menimbulkan komplikasi dalam penggunaan target kuantitas dalam pengendalian moneter. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai menggunakan kartu dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah. Semakin banyak masyarakat menggunakan APMK secara langaung mempercepat proses perputaran uang.

1. Meningkatnya transaksi APMK berpengaruh positif terhadap inflasi, karena dari hasil regresi sebesar 0,81 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara APMK dan Inflasi. Hal ini berarti bila APMK naik maka akan diikuti oleh kenaikan inflasi. Karena bila jumlah uang yang beredar dimasyakat meningkat akan menyebabkan inflasi.
2. Dilihat dari hasil regresi terhadap ketiga variabel yaitu APMK, Inflasi dan nilai tukar rupiah adalah 0,81 hal ini menunjukkan ada keterkaitan yang kuat antara ketiga variabel tersebut. Kenaikan transaksi APMK diikuti juga oleh kenaikan nilai tukar rupiah(kurs). Karena transaksi dalam negeri juga mempengaruhi permintaan uang.

Dari hasil penelitian ini, terlihat jelas bahwa ada pengaruh positif yang antara penggunaan APMK, nilai tukar dan inflasi. Maka Bank Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam hal pengendalian kebijakan moneter hendaknya lebih melihat pada perputaran uang yang semakin cepat sehingga mengambil kebijakan yang tepat.

1. Mengatur kebijakan pengadaan APMK dan mengontrol perputaran uang sehingga kenaikan transaksi APMK tidak berdampak terhadap inflasi dan Bank Indonesia melalui kebijakan APMK dapat menekan angka inflasi.
2. Mengatur kebijakan dan pengawasan APMK agar kenaikan transaksi APMK tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah(kurs).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Yrama Widya. Bandung, 2006
- Bolt, W, D. B.Humphrey dan R. Uittenbogaard. 2005. "The Effect of Trancation Pricing on the Adoption of Electronic Payments: A Cross-Country Comparison". *Working Paper Research Department* Federal Reserve Bank of Philadelphia, 05-28.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Kencana. Jakarta, 2008
- Global Insight. 2003. *The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economic Growth*. Visa International & Global Insight, California
- Listfield, R. dan F. Montes-Negret. 1994. "Modernizing Payment System in Emerging Economies". *World Bank Policy Research Working Paper*, 1336.
- Mankiw, N. Gregory. *Teori makroekonomi*, edisi kelima. Erlangga. Jakarta, 2003

- Mishkin, Frederic S. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta, 2001
- Mishkin, Frederic S. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta, 2008
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2005
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta, 2000
- Raharjo, Pratama. *Uang dan Perbankan*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Sriram, S. S. 1999. "Survey of Literature on Demand for Money: Theoretical and Empirical Work with Special Reference to Error-Correction Models". *IMF Working Paper*. WP/99/64.
- Humphrey, D B., L. B. Pulley, dan J. M. Vessala. 1996. "Cash, Paper, and Electronic Payments: A Cross-Country Analysis". *Journal of Money, Credit and Banking*, 28: 914-939.
- Syarifuddin dkk (2009). jurnal "Impact of non-cash payment increase on the economy and implication for monetary control in Indonesia"
- Azizah, Ihda. *Analisis Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 2007-2011*. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013
- Muttaqin, Z. 2006. *Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Variabel-Variabel Makroekonomi terhadap Permintaan Uang di Indonesia*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Situs WWW (World Wide Web)

Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id>

safirifitrieka.blogspot.com/2012/04/perkembangan-sistem-pembayaran-dan.html

sharingvision.com/2012/11/jumlah-atm-di-indonesia-dan-nilai-transaksi-per-harinya/

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx,d> (16Sep. 2014)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.